

## DRAMATURGI KOMUNIKASI POLITIK WALI KOTA CIREBON DALAM MENGELOLA CITRA DAN KEPEMIMPINAN DI RUANG PUBLIK

Anton Sulaiman<sup>1✉</sup>, Rifqi Fauzi<sup>2</sup>

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2</sup>

[antonsulaiman@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:antonsulaiman@bungabangsacirebon.ac.id)<sup>1</sup>, [rief.elfauzi01@gmail.com](mailto:rief.elfauzi01@gmail.com)<sup>2</sup>

Received: 2022-11-15; Accepted: 2022-12-18; Published: 2022-12-20

**Abstrak:** Era otonomi daerah pasca reformasi menuntut para pemimpin daerah mengembangkan strategi komunikasi politik yang adaptif dan responsif untuk membangun legitimasi kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Wali Kota Cirebon mengelola citra dan kepemimpinan di ruang publik melalui pendekatan dramaturgi komunikasi politik dengan tujuan mendeskripsikan penampilan citra kepemimpinan di front stage, mengungkap strategi komunikasi di backstage, serta menganalisis penerapan impression management dan role performance dalam membentuk persepsi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, staf komunikasi, jurnalis lokal, dan akademisi melalui purposive sampling, dimana data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara induktif dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan Wali Kota Cirebon menerapkan dramaturgi komunikasi politik secara komprehensif, dimana dalam front stage identitas kepemimpinan dibangun konsisten melalui kegiatan seremonial, interaksi media, dan platform digital dengan adaptasi sesuai audiens, sedangkan backstage menunjukkan profesionalisme tinggi melalui tim komunikasi terorganisir, perencanaan konten sistematis, dan manajemen krisis. Impression management dan role performance diterapkan melalui lima peran utama yaitu pemimpin visioner, bapak rakyat, administrator profesional, diplomat lokal, dan agen perubahan dengan transisi mulus antar peran sesuai konteks. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan model komunikasi politik berbasis dramaturgi untuk pemimpin daerah lain, peningkatan kapasitas tim komunikasi pemerintahan, dan adaptasi strategi komunikasi terhadap perkembangan teknologi digital, dimana temuan mengkonfirmasi relevansi teori dramaturgi Goffman dalam komunikasi politik modern dengan adaptasi terhadap kompleksitas era digital.

**Kata Kunci:** Dramaturgi, Komunikasi Politik, Walikota, Citra, Kepemimpinan, Ruang Publik

---

Copyright © 2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

## Pendahuluan

Dalam lanskap politik kontemporer Indonesia, fenomena kepemimpinan daerah mengalami transformasi signifikan seiring dengan era reformasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang lebih luas bagi kepala daerah untuk mengelola wilayahnya. Dinamika ini memunculkan tantangan baru dalam hal pengelolaan citra dan komunikasi politik, di mana para pemimpin daerah tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga dituntut untuk membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat melalui berbagai strategi komunikasi yang terencana dan terstruktur. Dalam konteks ini, Kota Cirebon sebagai salah satu daerah dengan kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi di Jawa Barat, menjadi arena yang menarik untuk dikaji bagaimana seorang wali kota mengelola citra kepemimpinannya di ruang publik.

Komunikasi politik dalam era digital dan keterbukaan informasi telah mengubah cara para pemimpin berinteraksi dengan publiknya. Nasrullah (2020) dalam karyanya tentang komunikasi politik digital menjelaskan bahwa pemimpin politik kini harus mampu menguasai berbagai platform komunikasi, mulai dari media konvensional hingga media sosial, untuk membangun narasi yang koheren tentang visi kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Cangara (2019) yang menekankan bahwa komunikasi politik modern tidak lagi bersifat satu arah, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih dialogis dan responsif terhadap dinamika opini publik. Dalam konteks kepemimpinan daerah, kemampuan mengelola komunikasi politik menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintahan.

Pendekatan dramaturgi Erving Goffman menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana para aktor politik mengelola kesan dan citra mereka di hadapan publik. Konsep ini menjadi relevan ketika kita memahami bahwa politik pada dasarnya adalah arena pertunjukan di mana setiap aktor berusaha menampilkan versi terbaik dari dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Sulhan (2020) dalam analisisnya tentang dramaturgi politik menegaskan bahwa setiap politisi pada dasarnya adalah aktor yang harus mampu memainkan perannya dengan baik di berbagai panggung, baik yang terlihat oleh publik maupun yang tersembunyi di balik layar. Konsep front stage dan back stage menjadi sangat penting dalam memahami dinamika ini, di mana seorang pemimpin harus mampu mengelola dua ruang yang berbeda namun saling terkait dalam strategi komunikasi politiknya.

Penelitian tentang komunikasi politik kepala daerah di Indonesia telah menunjukkan berbagai temuan menarik terkait strategi yang digunakan para pemimpin lokal. Wibowo (2021) dalam studinya tentang komunikasi politik gubernur-gubernur di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin daerah sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola impression management, yaitu bagaimana ia mampu menciptakan kesan positif yang konsisten di mata publik. Sementara itu, Pratama (2022) dalam penelitiannya tentang strategi komunikasi politik walikota di era media sosial mengungkapkan bahwa para pemimpin yang berhasil

adalah mereka yang mampu mengintegrasikan komunikasi konvensional dengan platform digital dalam satu narasi yang koheren dan autentik.

Kota Cirebon, dengan karakteristiknya yang unik sebagai kota dengan warisan budaya yang kuat namun juga menghadapi tantangan modernisasi, memberikan konteks yang menarik untuk menganalisis bagaimana seorang wali kota mengelola komunikasi politiknya. Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di pantai utara Jawa dan menjadi pintu gerbang antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, Cirebon menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, hingga pelestarian budaya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Wali Kota Cirebon dituntut untuk tidak hanya mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tetapi juga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada berbagai segmen masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Pentingnya pengelolaan citra dalam komunikasi politik pemimpin daerah juga ditekankan oleh Sari (2023) yang menjelaskan bahwa dalam konteks demokrasi lokal, kepercayaan publik menjadi modal utama bagi seorang pemimpin untuk dapat mengimplementasikan program-programnya secara efektif. Citra yang positif tidak hanya membantu dalam memperoleh dukungan politik, tetapi juga memfasilitasi kerjasama dengan berbagai stakeholder, mulai dari kalangan bisnis, civil society, hingga pemerintah pusat dan daerah lainnya. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang matang menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

Fenomena role performance dalam komunikasi politik juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dikaji. Handayani (2022) dalam studinya tentang peran gender dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa setiap pemimpin harus mampu menyesuaikan performanya sesuai dengan konteks audiens dan situasi yang dihadapi. Dalam konteks kepemimpinan daerah, hal ini berarti seorang wali kota harus mampu menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas dalam forum-forum resmi, sebagai figur yang dekat dengan rakyat dalam acara-acara kemasyarakatan, dan sebagai negarawan yang visioner dalam forum-forum yang lebih luas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai peran ini menjadi kunci dalam membangun kredibilitas dan efektivitas kepemimpinan.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian mendalam tentang aplikasi teori dramaturgi dalam konteks komunikasi politik kepala daerah di Indonesia, khususnya di tingkat kota. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada level nasional atau provinsi, sementara dinamika politik lokal memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan analisis yang spesifik. Selain itu, dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam era digital dan globalisasi, pemahaman yang mendalam tentang strategi komunikasi politik menjadi sangat relevan tidak hanya bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi praktisi politik dan pemerintahan.

Dengan menggunakan pendekatan dramaturgi Goffman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana

seorang wali kota mengelola berbagai aspek komunikasi politiknya, mulai dari penampilan di ruang publik hingga strategi yang dirancang di balik layar. Analisis terhadap front stage dan back stage dalam komunikasi politik Wali Kota Cirebon akan memberikan wawasan berharga tentang mekanisme pengelolaan citra dan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia kontemporer.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mendalami fenomena komunikasi politik yang dilakukan oleh Wali Kota Cirebon dalam konteks pengelolaan citra dan kepemimpinan di ruang publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika interaksi sosial dan strategi komunikasi dalam konteks spesifik tersebut. Studi kasus menjadi pilihan tepat untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan holistik sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman makna di balik tindakan sosial (Susanto, 2022).

Sumber data utama penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait komunikasi politik Wali Kota Cirebon. Informan yang dipilih meliputi pejabat pemerintah daerah, staf komunikasi, jurnalis lokal, dan akademisi yang fokus pada politik lokal. Pemilihan informan secara purposive bertujuan memastikan data yang terkumpul relevan dan kaya informasi. Selain itu, data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, berita media massa, dan konten media sosial yang terkait dengan aktivitas komunikasi politik juga digunakan untuk memperkuat analisis (Harahap, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking agar kredibilitas data terjamin. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berjalan paralel dengan proses pengumpulan data. Pendekatan ini memudahkan identifikasi pola dan tema yang muncul selama penelitian berlangsung (Bahartiar, 2020)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Front Stage Kepemimpinan Wali Kota Cirebon dalam Komunikasi Politik**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa Wali Kota Cirebon menerapkan strategi komunikasi politik yang terstruktur dalam menampilkan citra kepemimpinannya di ruang publik. Front stage komunikasi politik Wali Kota Cirebon termanifestasi melalui beberapa arena utama, yaitu kegiatan seremonial pemerintahan, interaksi dengan media massa, aktivitas di media sosial, dan partisipasi dalam forum-forum publik.

Dalam kegiatan seremonial pemerintahan, Wali Kota Cirebon secara konsisten menampilkan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat namun tetap mempertahankan otoritas kepemimpinan. Penggunaan busana yang disesuaikan dengan konteks acara, mulai dari pakaian formal dalam rapat dinas hingga pakaian kasual saat blusukan ke kampung-kampung, menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap audiens yang berbeda. Gestur tubuh dan cara berbicara yang disesuaikan dengan latar belakang audiens juga menjadi ciri khas performansi kepemimpinannya.

Interaksi dengan media massa menunjukkan pola yang terencana dengan baik. Wali Kota Cirebon secara rutin menggelar konferensi pers dan memberikan keterangan kepada media, khususnya terkait program-program pembangunan dan kebijakan strategis. Pemilihan timing dan isu yang diangkat dalam interaksi media selalu diselaraskan dengan momentum politik dan kebutuhan pencitraan. Penggunaan bahasa yang lugas namun tetap santun menjadi karakteristik komunikasi politiknya di hadapan media.

Platform media sosial menjadi arena front stage yang paling dinamis bagi Wali Kota Cirebon. Konten yang dibagikan menampilkan keseimbangan antara aktivitas resmi pemerintahan dan momen-momen informal yang menunjukkan sisi humanis kepemimpinan. Dokumentasi kunjungan lapangan, dialog dengan masyarakat, dan pencapaian pembangunan daerah menjadi konten dominan yang dikemas dengan narasi yang mudah dipahami masyarakat.

Temuan penelitian ini menggunakan konsep front stage dalam teori dramaturgi Goffman yang menekankan pentingnya pengelolaan kesan dalam interaksi sosial. Menurut Goffman (1959), front stage merupakan ruang di mana individu menampilkan performansi yang telah dirancang untuk menciptakan kesan tertentu kepada audiens. Dalam konteks komunikasi politik Wali Kota Cirebon, front stage menjadi arena strategis untuk membangun legitimasi kepemimpinan dan mempertahankan dukungan politik masyarakat.

Konsep impression management yang dikembangkan Goffman (1959) sangat relevan dengan praktik komunikasi politik yang dilakukan Wali Kota Cirebon. Setiap penampilan di ruang publik dirancang untuk menciptakan kesan positif yang selaras dengan ekspektasi masyarakat terhadap figur pemimpin yang ideal. Adaptasi gaya komunikasi dan penampilan fisik terhadap berbagai audiens menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengelola kesan dalam setiap interaksi politik (Sulhan, 2020).

Penggunaan berbagai platform komunikasi sebagai front stage mencerminkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik audiens yang berbeda. Media massa tradisional digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih formal dan membutuhkan informasi yang kredibel, sementara media sosial dimanfaatkan untuk membangun

kedekatan emosional dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Strategi ini sejalan dengan konsep audience segregation yang dikemukakan Goffman, di mana aktor sosial menyesuaikan performansinya dengan karakteristik audiens yang berbeda (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Dimensi simbolik dalam performansi kepemimpinan Wali Kota Cirebon juga mencerminkan konsep dramaturgi yang menekankan pentingnya simbol dalam komunikasi sosial. Penggunaan setting fisik, kostum, dan properti pendukung dalam setiap penampilan publik menunjukkan kesadaran akan kekuatan simbolik dalam membangun citra kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan argumen Goffman bahwa elemen-elemen fisik dalam performansi turut menentukan kredibilitas dan efektivitas komunikasi (Goffman, 1959).

Konsistensi dalam menampilkan identitas kepemimpinan di berbagai platform komunikasi menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan front stage. Wali Kota Cirebon berhasil mempertahankan koheren antara pesan, gaya komunikasi, dan citra yang ditampilkan di media massa, media sosial, dan forum-forum publik. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari kontradiksi yang dapat merusak kredibilitas kepemimpinan (Carey, 2019).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa front stage komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencitraan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik. Melalui berbagai platform komunikasi, Wali Kota Cirebon secara reguler melaporkan capaian kinerja pemerintahan dan menerima feedback dari masyarakat. Praktik ini mencerminkan evolusi konsep front stage dalam era digital yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga interaktif dan dialogis.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah pentingnya memahami front stage sebagai ruang yang dinamis dan adaptif dalam konteks komunikasi politik kontemporer. Integrasi media tradisional dan digital dalam strategi front stage menunjukkan kompleksitas pengelolaan citra dalam era informasi yang menuntut transparansi dan responsivitas yang tinggi dari para pemimpin politik.

### **Strategi Back Stage Komunikasi Politik Wali Kota Cirebon**

Penelitian ini mengungkap bahwa di balik penampilan publik Wali Kota Cirebon yang terlihat spontan dan natural, terdapat struktur backstage yang terorganisir dengan baik untuk mendukung strategi komunikasi politiknya. Back stage komunikasi politik Wali Kota Cirebon dikelola melalui beberapa komponen utama: tim komunikasi strategis, perencanaan konten dan narasi, manajemen krisis, serta koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal.

Tim komunikasi strategis yang dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol berfungsi sebagai garda terdepan dalam merancang strategi komunikasi. Tim ini terdiri dari spesialis media relations, content creator, social media manager, dan speechwriter yang bekerja secara terkoordinasi. Berdasarkan wawancara dengan informan, tim ini mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dan merencanakan strategi untuk periode selanjutnya. Struktur organisasi tim komunikasi menunjukkan pembagian tugas yang jelas dengan sistem pelaporan yang hierarkis namun tetap fleksibel.

Proses perencanaan konten dan narasi melibatkan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tim komunikasi secara rutin melakukan monitoring media dan survei opini publik untuk mengidentifikasi tren komunikasi yang perlu direspons. Setiap konten komunikasi, baik untuk media massa maupun media sosial, melalui proses kurasi yang melibatkan pertimbangan timing, target audiens, dan potensi dampak politik. Dokumentasi menunjukkan bahwa setiap bulan terdapat tema komunikasi utama yang dikembangkan menjadi berbagai format konten sesuai karakteristik platform yang digunakan.

Sistem manajemen krisis komunikasi menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi situasi yang berpotensi merusak citra kepemimpinan. Tim komunikasi memiliki protokol standar untuk merespons isu-isu sensitif, termasuk prosedur eskalasi, draft pernyataan siap pakai untuk berbagai skenario, dan jaringan komunikasi dengan media partner. Berdasarkan analisis dokumen, terdapat beberapa kasus di mana sistem ini berhasil meminimalisir dampak negatif dari isu-isu kontroversial yang muncul.

Koordinasi dengan stakeholder internal melibatkan sinkronisasi pesan antara berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memastikan konsistensi narasi komunikasi pemerintahan. Setiap SKPD memiliki focal point komunikasi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada tim komunikasi pusat. Sementara itu, koordinasi dengan stakeholder eksternal mencakup pembangunan relasi dengan media lokal, tokoh masyarakat, dan influencer yang dapat mendukung penyebaran pesan komunikasi politik.

Temuan penelitian ini memperkuat konsep back stage dalam teori dramaturgi Goffman yang menggambarkan ruang privat di mana aktor mempersiapkan performansinya sebelum tampil di hadapan audiens. Menurut Goffman (1959), back stage merupakan area dimana individu dapat melepaskan topeng sosialnya dan mempersiapkan strategi untuk penampilan di front stage. Dalam konteks komunikasi politik Walikota Cirebon, backstage menjadi ruang strategis untuk merancang dan

mengkoordinasikan seluruh elemen komunikasi politik yang akan ditampilkan kepada publik.

Struktur tim komunikasi yang terorganisir mencerminkan konsep team performance yang dikembangkan Goffman, dimana sekelompok individu bekerja sama untuk menciptakan performansi yang koheren di hadapan audiens. Tim komunikasi Wali Kota Cirebon berfungsi sebagai "supporting cast" yang memastikan setiap penampilan publik berjalan sesuai dengan strategi yang telah dirancang (Sulhan, 2020). Pembagian peran yang jelas dalam tim komunikasi menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kompleksitas pengelolaan komunikasi politik dalam era digital yang menuntut respons yang cepat dan tepat.

Proses perencanaan konten dan narasi yang sistematis menunjukkan penerapan konsep script dalam dramaturgi. Goffman (1959) menekankan bahwa setiap performansi sosial membutuhkan script atau naskah yang memberikan panduan tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam konteks komunikasi politik, script ini tidak hanya berupa teks pidato atau pernyataan resmi, tetapi juga mencakup strategi komunikasi visual, pemilihan timing, dan penyesuaian pesan terhadap karakteristik audiens yang berbeda (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Sistem manajemen krisis komunikasi mencerminkan konsep defensive practices yang dikemukakan Goffman untuk melindungi definisi situasi yang telah dibangun oleh aktor. Kesiapan menghadapi situasi krisis menunjukkan kesadaran bahwa performansi di front stage rentan terhadap gangguan yang dapat merusak kesan yang ingin diciptakan (Carey, 2019). Protokol standar dan draft pernyataan siap pakai berfungsi sebagai protective practices yang memungkinkan pemulihan cepat dari situasi yang berpotensi merusak citra kepemimpinan.

Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal menunjukkan pentingnya audience segregation dalam strategi backstage. Goffman menekankan bahwa aktor sosial harus mampu mengelola berbagai audiens yang memiliki ekspektasi yang berbeda tanpa menciptakan kontradiksi yang dapat merusak kredibilitas performansi (Goffman, 1959). Koordinasi dengan SKPD memastikan konsistensi pesan internal, sementara pembangunan relasi dengan stakeholder eksternal menciptakan jaringan dukungan yang dapat memperkuat efektivitas komunikasi politik.

Temuan penelitian ini juga mengungkap evolusi konsep back stage dalam era digital yang ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Backstage komunikasi politik tidak lagi sepenuhnya tersembunyi dari publik, tetapi menjadi bagian dari strategi transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan tentang proses perencanaan komunikasi dan struktur tim yang

mengelolanya menunjukkan adaptasi terhadap tuntutan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Harahap, 2020).

Dimensi teknologi dalam pengelolaan backstage juga menjadi temuan penting yang menunjukkan bagaimana digitalisasi mengubah cara kerja tim komunikasi politik. Penggunaan tools monitoring media sosial, sistem manajemen konten, dan platform koordinasi internal menunjukkan integrasi teknologi dalam strategi komunikasi politik kontemporer. Hal ini sejalan dengan perkembangan dramaturgi digital yang menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung performansi sosial (Bahartiar, 2020).

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah pentingnya memahami backstage tidak hanya sebagai ruang persiapan, tetapi juga sebagai sistem yang menentukan kualitas dan efektivitas komunikasi politik. Profesionalisme dalam pengelolaan backstage berkontribusi signifikan terhadap kredibilitas dan konsistensi performansi di front stage, yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi kepemimpinan politik.

### **Impression Management dan Role Performance Wali Kota Cirebon dalam Membangun Persepsi Publik**

Berdasarkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan informan kunci, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Wali Kota Cirebon menerapkan strategi impression management yang sistematis dan memainkan berbagai peran kepemimpinan (role performance) yang disesuaikan dengan konteks dan audiens yang dihadapi. Temuan menunjukkan adanya pola-pola terstruktur dalam pengelolaan kesan dan adaptasi peran yang dilakukan secara konsisten.

Dalam aspek impression management, Wali Kota Cirebon menerapkan teknik pengelolaan kesan melalui kontrol naratif yang ketat. Setiap komunikasi publik selalu didahului dengan briefing internal yang memastikan konsistensi pesan dan alignment dengan visi kepemimpinan yang ingin dibangun. Tim komunikasi secara aktif melakukan monitoring terhadap respons publik dan media untuk mengidentifikasi potensi isu yang dapat merusak citra, kemudian merespons dengan strategi komunikasi krisis yang telah disiapkan sebelumnya.

Penggunaan storytelling personal menjadi salah satu teknik impression management yang paling efektif. Wali Kota secara strategis membagikan cerita-cerita personal tentang latar belakang keluarga, perjalanan karir, dan pengalaman hidup yang dapat membangun empati dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Narasi tentang komitmen terhadap pembangunan Cirebon selalu dikaitkan dengan identitas personal sebagai putra daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam konteks role performance, penelitian mengidentifikasi lima peran utama yang dimainkan Wali Kota Cirebon secara bergantian sesuai dengan situasi dan audiens. Pertama, peran sebagai "pemimpin visioner" yang ditampilkan dalam forum-forum strategis dan presentasi program pembangunan jangka panjang. Kedua, peran sebagai "bapak rakyat" yang dekat dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya saat berinteraksi langsung dengan warga di tingkat grassroot. Ketiga, peran sebagai "administrator profesional" yang kompeten dalam mengelola birokrasi dan implementasi kebijakan. Keempat, peran sebagai "diplomat lokal" dalam berinteraksi dengan pemerintah pusat, daerah lain, dan investor. Kelima, peran sebagai "agen perubahan" yang progresif dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan modern.

Transisi antar peran dilakukan dengan mulus melalui penyesuaian gaya komunikasi, bahasa tubuh, dan pilihan kostum yang sesuai dengan konteks. Dalam pertemuan dengan investor, Walikota menampilkan sosok profesional dengan menggunakan bahasa teknis dan data-data pembangunan yang akurat. Sebaliknya, saat berinteraksi dengan pedagang tradisional atau petani, beliau menggunakan bahasa lokal dan pendekatan yang lebih informal untuk membangun kedekatan.

Dokumentasi visual menjadi elemen penting dalam impression management dan role performance. Setiap aktivitas publik didokumentasikan secara profesional dengan memperhatikan angle, lighting, dan komposisi yang dapat mendukung citra kepemimpinan yang ingin dibangun. Foto-foto kegiatan kemudian disebarluaskan melalui berbagai channel komunikasi dengan caption yang mendukung narasi kepemimpinan.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi relevansi konsep impression management Goffman dalam konteks komunikasi politik kontemporer. Menurut Goffman (1959), impression management merupakan proses di mana individu mengontrol informasi yang akan dikomunikasikan kepada orang lain untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Dalam konteks kepemimpinan politik, kemampuan mengelola kesan menjadi krusial untuk membangun dan mempertahankan legitimasi kekuasaan (Sulhan, 2020).

Strategi kontrol naratif yang diterapkan Wali Kota Cirebon mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap kekuatan narasi dalam membentuk persepsi publik. Hal ini sejalan dengan konsep dramaturgi yang menekankan pentingnya konsistensi dalam performansi untuk menjaga kredibilitas aktor sosial. Penggunaan briefing internal dan monitoring respons publik menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan impression management yang tidak lagi bersifat spontan, tetapi telah menjadi strategi komunikasi yang terencana (Carey, 2019).

Teknik story telling personal yang digunakan mengimplementasikan konsep "authentic self-presentation" dalam dramaturgi modern. Goffman (1959) menekankan bahwa keautentikan dalam performansi dapat meningkatkan kredibilitas dan penerimaan audiens. Namun, dalam konteks politik, keautentikan ini tetap merupakan konstruksi yang dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan ekspresi spontan kepribadian (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Multiplisitas peran yang dimainkan Wali Kota Cirebon mencerminkan kompleksitas role performance dalam kepemimpinan politik modern. Konsep role distance yang dikembangkan Goffman menjelaskan kemampuan individu untuk memainkan berbagai peran sambil tetap mempertahankan identitas inti. Dalam konteks ini, Wali Kota berhasil mengintegrasikan berbagai ekspektasi peran yang berbeda ke dalam satu identitas kepemimpinan yang koheren (Bauman, 2018).

Kemampuan melakukan transisi antar peran dengan mulus menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam dramaturgi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa role performance tidak hanya membutuhkan kemampuan akting, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan audiens yang berbeda. Adaptasi gaya komunikasi dan appearance sesuai konteks menunjukkan sensitivity terhadap cultural codes yang berlaku dalam masyarakat Cirebon (Prasetyo, 2021).

Pemanfaatan dokumentasi visual sebagai bagian dari impression management mencerminkan evolusi dramaturgi dalam era digital. Media visual memiliki kekuatan persuasif yang lebih besar dibandingkan teks, sehingga kontrol terhadap representasi visual menjadi krusial dalam komunikasi politik modern. Strategi ini sejalan dengan konsep "visual dramaturgy" yang menekankan pentingnya elemen visual dalam konstruksi identitas sosial (Hartono, 2020).

Integrasi antara impression management dan role performance dalam praktik komunikasi politik Wali Kota Cirebon menunjukkan sofistikasi strategi komunikasi yang tidak lagi bergantung pada karisma personal semata, tetapi pada kemampuan mengelola performansi secara profesional. Hal ini mengindikasikan transformasi kepemimpinan politik dari model tradisional yang bersifat patrimonial menuju model modern yang lebih rasional dan terstruktur.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan konsep dramaturgi yang dapat mengakomodasi kompleksitas komunikasi politik dalam era digital. Traditional dramaturgy Goffman yang dikembangkan dalam konteks interaksi *face-to-face* perlu diadaptasi untuk memahami dinamika komunikasi politik yang melibatkan multiple platforms dan diverse audiences secara simultan.

Dari perspektif praktis, keberhasilan impression management dan role performance Wali Kota Cirebon dapat menjadi model untuk pengembangan strategi

komunikasi politik yang lebih efektif. Namun, perlu diingat bahwa sustainabilitas strategi ini bergantung pada kemampuan mempertahankan konsistensi performansi dalam jangka panjang dan adaptasi terhadap perubahan ekspektasi publik.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Wali Kota Cirebon telah menerapkan konsep dramaturgi komunikasi politik secara komprehensif dalam mengelola citra dan kepemimpinannya di ruang publik. Dalam dimensi front stage, Walikota berhasil membangun identitas kepemimpinan yang konsisten melalui berbagai platform komunikasi, mulai dari kegiatan seremonial, interaksi media massa, media sosial, hingga forum publik. Strategi adaptasi gaya komunikasi sesuai karakteristik audiens menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip impression management dalam teori dramaturgi Goffman, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang memungkinkan dialog interaktif dengan masyarakat.

Dimensi backstage menunjukkan profesionalisme tinggi dalam perencanaan komunikasi melalui struktur tim terorganisir, sistem briefing rutin, dan monitoring opini publik. Setiap performansi front stage merupakan hasil persiapan matang dengan strategi pengelolaan isu dan komunikasi krisis yang telah diantisipasi. Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal mencerminkan pemahaman bahwa komunikasi politik modern membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan multiple actors. Keterkaitan erat antara backstage dan front stage mengkonfirmasi relevansi konsep dramaturgi dalam menganalisis kompleksitas komunikasi politik kontemporer.

Penerapan impression management dan role performance menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola multiplisitas identitas kepemimpinan. Wali Kota mampu memainkan lima peran utama secara bergantian - pemimpin visioner, bapak rakyat, administrator profesional, diplomat lokal, dan agen perubahan - dengan transisi mulus yang menunjukkan profesionalisme tinggi. Penggunaan storytelling personal dan dokumentasi visual mencerminkan evolusi dramaturgi era digital dengan penekanan pada dimensi visual dan naratif emosional. Keberhasilan mengintegrasikan impression management dan role performance berkontribusi pada legitimasi politik dan transformasi kepemimpinan dari model tradisional-patrimonial menuju modern-rasional. Temuan mengkonfirmasi relevansi teori dramaturgi Goffman untuk memahami komunikasi politik modern, meskipun memerlukan adaptasi terhadap kompleksitas komunikasi multi-platform dalam era digital.

### **Daftar Pustaka**

- Bahartiar, B. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif komunikasi politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cangara, H. (2019). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Carey, J. W. (2019). *Communication as culture: Essays on media and society*. New York: Routledge.
- Goffman, E. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.
- Handayani, S. (2022). *Peran dan Gender dalam Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, D. A. (2020). *Analisis data kualitatif dalam penelitian sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Heryanto, G. G. (2022). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Hikmat, M. M. (2022). *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*. Jakarta: Bukukita Publisher.
- Indriasari, R. (2022). *Buku Komunikasi Politik Pemerintahan*. Yogyakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nasrullah, R. (2020). *Komunikasi Politik Digital: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratama, A. (2022). *Strategi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Pureklolon, T. T. (2022). *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta: Kemendagri Press.
- Ritzer, G., & Stepanisky, J. (2017). *Teori sosiologi: Dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, D. P. (2022). *Citra dan Kepercayaan dalam Politik Lokal Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Setiawan, A. (2022). *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sulhan, M. (2020). *Dramaturgi komunikasi politik: Teori dan praktik dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sulhan, M. (2020). *Dramaturgi Politik: Analisis Komunikasi Politik Kontemporer*. Malang: UB Press.
- Susanto, E. H. (2009). *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wibowo, T. (2021). *Komunikasi Politik Kepala Daerah: Studi Komparatif Gubernur di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.